

KEKUASAAN *VERSUS* KEBUDAYAAN ♥

Dr. Yudiaryani, M.A.

Budaya dan Hegemoni

Sepanjang dua bulan terakhir, kita diteror oleh kabar seputar Manohara yang mengalami KDRT oleh suaminya sendiri di Malaysia. Kita tersentak oleh wajah hancur Sitti Hajar yang dimartil oleh majikannya. Kita dikagetkan dengan berita Prita Mulyasari yang dipenjara karena curhat di media maya. Kampanye pilihan presiden pun sempat membuat kita harus mengelus dada ketika seorang tokoh partai dengan menyitir ucapan seorang ulama melansir pernyataan bahwa "mengapa calon Ibu Negara tidak menggunakan jilbab". Kasus seorang Jaksa, yang notabene adalah penegak hukum, melakukan penganiayaan fisik dan mental kepada anak dan istrinya. Kasus penangkapan Antasari yang tidak terasa sedap jika tidak dibubuhi oleh gosip keterlibatan sosok perempuan, Rani. Masih sederet kasus yang terkait dengan persoalan kekerasan dan pelecehan hak asasi perempuan. Dari sisi perlindungan hak asasi, agama, hukum, keluarga, dan ekonomi, perempuan selalu menjadi korban. Atau setidaknya perempuan menjadi kambing hitam bagi persoalan yang terjadi di wilayah laki-laki. Kesemua persoalan tersebut menunjukkan bahwa negara dengan peraturan-peraturan yang dibuatnya masih memberi peluang terhadap kondisi yang mendorong terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Padahal perempuan adalah juga warga negara dan sumber daya manusia yang diperhitungkan dalam pembangunan budaya bangsa. Perempuan berhak memiliki kebebasan dalam bersuara, bertindak, dan mengembangkan jati dirinya.

Kekerasan terhadap perempuan adalah produk konkret dari penindasan budaya patriarki. Di masa lalu, kebudayaan tidak lebih dari usaha manusia untuk mempertahankan dirinya, lingkungannya. Pada masa kemudian, kebudayaan menunjukkan bagaimana manusia berusaha memuliakan dirinya dengan kesadaran bahwa mereka adalah makhluk terunggul di bumi. Di masa kini, keunggulan manusia mendapat ujian yang sangat berat. Fenomena alam dan konflik berdimensi global menunjukkan indikasi pemusnahan manusia hingga 70% populasi dengan segala produk peradabannya. Zaman membentuk wajah kebudayaan kembali pada substansi budaya masa purba yang, di antaranya, dipenuhi konflik pertahanan diri. Budaya mengeruk kekayaan dan mempertahankan diri menjadi manifestasi dari perebutan secara material. Perbaikan tampilan ekonomi selalu menuntut inovasi dengan kesibukan yang rentan konflik. Lalu, masyarakat hanya mengenal satu pola hubungan, yaitu persaingan. Seolah membenarkan pernyataan Ignas Kleden bahwa kebudayaan adalah hasil bentukan manusia, sekaligus yang membentuk manusia. Kebudayaan bukan sebuah noktah yang diam setelah diciptakan oleh manusia, tetapi secara dialektis kembali membentuk kehidupan manusia dalam cara-cara yang tidak selamanya sama dengan proses terdahulu.

Kebudayaan masa kini diharuskan menghadapi persoalan-persoalan pelik yang muncul di antara relasi penguasa, kekuasaan, dan kebudayaan. Pertama, di tingkat pengambil keputusan/penguasa di negeri ini, misalnya, penanganan bidang kebudayaan masih seperti "kutu loncat" yang dapat dipasangkan dengan bidang lain, seperti dengan bidang pendidikan dan juga dengan bidang pariwisata. Kedua, kebudayaan hanya dianggap sebagai produk material yang dapat teramati dan terukur baik dalam produk keras maupun lunak. Memasukkan kesenian sebagai karya budaya justru akan menumbuhkan pemahaman yang bias. Kebudayaan hanya terdata sebagai suatu bentuk bangunan, artefak, ilmu, syariat agama atau teknologi. Kebudayaan akhirnya mengalami materialisasi hingga ke tempat yang paling sempit: komodifikasi. Kebudayaan pun menjadi suatu bentuk apresiasi kasar yang menempatkan kekuasaan lebih sebagai perangkat yang dapat dikooptasi atau justru diperalat untuk meneguhkan kekuasaan. Ketiga, dalam suatu sistem komunikasi budaya dengan versi penguasa, penguasa akan sibuk berbicara tetapi tanpa mau mendengarkan, dan mengucapkan kata-kata tanpa mau memahami. Budaya versi penguasa seperti itulah yang terjadi pada saat budaya tradisi dengan nilai-nilai unggul dan luhur yang diembannya digunakan oleh penguasa untuk mendekati masyarakatnya. Akibatnya muncul pemaksaan nilai-nilai budaya yang telah direkayasa kepada masyarakat sebagai nilai budaya panutan dan konflik muncul antara penguasa dan masyarakatnya bahkan sesama anggota masyarakat.

Yasraf Amir Piliang menyebutkan bahwa pembentukan suatu kebudayaan bukanlah suatu perbincangan mengenai suatu kepastian, akan tetapi sebuah pilihan, sebuah perencanaan, dan suatu perbincangan yang berkembang secara "sirkuler", serta merupakan suatu jaringan hubungan yang kompleks antara masa lalu dan masa kini yang berlangsung secara holistik.¹ Kebudayaan semacam ini tentu saja merupakan suatu wujud budaya yang sangat dinamis dengan segala pemahaman hasil yang bisa optimis dan juga pesimis. Optimis, karena budaya membuka peluang bagi keluasan cakrawala dalam pergaulan globalisasi, penciptaan gagasan, wujud yang lebih kaya dan lebih bernilai bagi kehidupan manusia. Pesimisme muncul, mengingat keluasan cakrawala pergaulan justru sering mencipta ketidaksetaraan, keterpinggiran, dan ketertindasan di setiap momen-momen perkembangan.

Raymond Williams lebih jauh menyebut kebudayaan sebagai "keseluruhan cara hidup" di mana makna dan nilai sehari-hari adalah bagian dari totalitas ekspresif hubungan-hubungan sosial. Williams memberi batasan tiga tingkatan pengertian budaya, yaitu **pertama**, budaya yang dialami (*lived culture*) dalam suatu ruang dan waktu tertentu yang hanya bisa diakses oleh mereka yang hidup di ruang dan waktu tertentu pula. Budaya semacam ini dapat digunakan untuk menunjuk pada suatu proses umum dari perkembangan intelektual, spiritual, dan estetika sehari-hari sebuah masyarakat. **Kedua**, budaya sebagai suatu jalan hidup spesifik yang dianut baik oleh orang, periode maupun oleh sebuah kelompok tertentu dalam masyarakat. Inilah yang disebut budaya periode (*culture of the period*). Budaya periode dapat

digunakan untuk mengamati kebiasaan, kesenangan, dan jenis aktivitas masyarakat tertentu. **Ketiga**, budaya dipakai untuk menunjuk karya dan praktik intelektual terutama aktivitas estetis. Budaya ini terhampir pada bentuk-bentuk syair, tari, teater, wayang. Budaya ini disebut dengan budaya tradisi selektif, *selected culture*, yang merupakan pula suatu praktik penandaan.²

Berdasarkan rumusan Piliang dan Williams di atas mencerminkan bahwa kehadiran sebuah kebudayaan tercermin dari bagaimana komunikasi berlangsung di antara sesama anggota masyarakat. Lebih tepatnya sebagai kontak di antara orang-orang yang melihat dirinya sendiri berbeda dari orang lain dalam hal budaya mereka. Pentingnya sikap dialogis tersebut adalah untuk menjaga hubungan yang seimbang atau hubungan simetris dalam interaksi antarbudaya. Kebudayaan pada akhirnya menjadi medan nyata tempat praktik, representasi, bahasa dan kebiasaan suatu masyarakat berdialog. Budaya menjadi bentuk kontradiktif akal sehat yang sudah mengakar dan ikut membentuk kehidupan sehari-hari. Budaya berkaitan dengan pertanyaan tentang makna sosial, yaitu beragam cara yang kita gunakan untuk memahami dunia.

Karakter dinamis dan dialogis kebudayaan menumbuhkan semacam daya hegemonik yang pada gilirannya tidak hanya mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan riil ke hal-hal yang bersifat artifisial, tetapi juga terus menerus menciptakan diskursus baru yang secara potensial membongkar keburukan sistem sosial yang mapan dan kuat. Dalam kondisi demikian yang diperlukan adalah pemikiran "kritis" yang memungkinkan masyarakat membangun sesuatu dari ketidakpuasan ini. Sebab ketidakseimbangan pada sesuatu bukan berarti menolaknya, tetapi diperlukan suatu pencarian alternatif. Tampaknya alternatif hanya mungkin dilakukan dengan "dorongan kuat pada kreativitas – pergulatan aktif terhadap suatu kesadaran baru". Manusia tampaknya berusaha memeralat hegemoni kebudayaan demi pencapaian tata nilai kehidupan yang lebih manusiawi dan setar.

Ideologi Hegemoni

Konsep yang paling penting dari kajian Gramsci terletak pada konsep hegemoni. Hegemoni berkaitan dengan suatu situasi di mana bagian yang mensejarah dari suatu kelompok yang berkuasa mendapatkan kewenangan dan kepemimpinan atas kelompok-kelompok subordinat dengan cara merebut persetujuan dan memenangi kesadaran. Hegemoni pun merupakan suatu proses pembuatan untuk mempertahankan dan mereproduksi makna serta praktik-praktik kekuasaan. Hegemoni selalu berjalan seiring dengan suatu penerapan ideologi. Ideologi adalah peta-peta makna yang meski berpretensi mengandung kebenaran universal, sebenarnya merupakan pemahaman historis yang menopengi dan melanggengkan kekuasaan.³ Misalnya, representasi gender dalam iklan yang menggambarkan perempuan

sebagai tubuh-tubuh seksi atau ibu rumah tangga semata berhasil mereduksi perempuan ke dalam kategori-kategori tersebut.

Di dalam sistem hegemoni yang bersifat ideologis, kekuasaan memiliki kecenderungan untuk melakukan hegemoni makna terhadap kenyataan sosial dan daya hidup kebudayaan. Misalnya, peristiwa kampanye PILPRES menunjukkan bagaimana lembaga survey menjadi corong bagi berlangsungnya suatu ideologi kekuasaan. Penggiringan persepsi massa, seperti putaran 1 dan putaran 2, telah ditentukan sebelum peristiwa yang sebenarnya terjadi. Demikian juga penambahan utang negara diselaraskan dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Di sini terjadi penerapan otoritas tunggal dan dominasi kepemimpinan untuk mengklaim suatu kebenaran secara sepihak. Orang harus menyadari bahwa dominasi berlangsung pada tahap sadar maupun tidak sadar sehingga perlawanan terhadap hegemoni tidak akan terjadi jika masyarakat tidak terbebaskan dari keterpesonaan pada tataran hegemonik yang dibungkus sedemikian canggih lewat praktik diskursus politik sistem kenegaraan ataupun ilusi-ilusi budaya kapitalis.

Louis Althusser menyatakan bahwa manifestasi ideologi hegemonik berlangsung melalui pengaruh budaya yang disebarkan secara sadar dan dapat meresap, serta berperan dalam menafsirkan pengalaman tentang kenyataan. Proses penafsiran memang berlangsung secara tersembunyi (tersamar), tetapi terjadi secara terus menerus. Artinya, secara sistematis ideologi hegemonik mencekoki banyak orang dengan pikiran-pikiran tertentu, doktrin-doktrin tertentu, bias-bias tertentu, dan sistem-sistem preferensi tertentu. Hal tersebut jauh lebih menentukan dalam jangka panjang daripada memaksa mereka melakukan sesuatu di bawah ancaman laras bedil. Sistem hegemoni justru berhasil dalam negara yang stabil yang biasanya dihasilkan melalui budaya, bukan kekerasan langsung. Dengan demikian, ada dua kunci bagi beroperasinya hegemoni budaya, yaitu yang dicapai secara budaya dan kekerasan langsung.⁴

Lantas, bagaimana gejala hegemoni budaya yang berkelebat dalam komunikasi seperti yang disampaikan Pilliang dapat dijelaskan? Ada tiga aspek utama yang bisa dijadikan pertimbangan bagi mereka yang ingin mengkaji konsep hegemoni budaya. Pertama, mempelajari seni, media massa, dan budaya sehari-hari sebagai proses mempersuasi masyarakat untuk memahami dunia berdasarkan cara-caranya sendiri, tidak dengan cara yang lain. Kedua, cara menghayati dan mengalami dunia sehari-hari seperti yang kita jalani memiliki konsekuensi-konsekuensi politik yang mendalam. Ketiga, memahami keberhasilan hegemoni budaya karena ia fleksibel, responsif terhadap kondisi-kondisi yang sedang berubah, dan bersifat adaptif.

Apabila tatanan hegemoni memiliki tingkat fleksibilitas dan kapasitas adaptif, cengkeraman gurita budaya dan ideologi kapitalisme justru semakin menggalak. Ideologi kapitalisme masih bertahan karena genggamannya ideologisnya terhadap massa. Dominasi budaya borjuis membuat penggunaan kekuatan politik tak perlu untuk mempertahankan

kekuasaan, tetapi cukuplah masyarakat dibuat pulas dengan cara membuka seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya media hiburan mimpi, khayalan, dagelan konyol melalui iklan dan tayangan program TV. Juga budaya pemujaan terhadap materi melalui pusat-pusat kenikmatan seperti Mall. Banyak contoh betapa naluri hegemonik telah merasuk ke alam bawah sadar masyarakat. Munculnya kecenderungan arogansi kekuasaan dan arogansi intelektual yang menghinggapi aparatur birokrasi dan cendekiawan/intelektual, dan persoalan melunturnya etika sosial dan moralitas publik yang menyentuh dataran kognitif menyebabkan apa yang disebut Erich Fromm sebagai "hancurnya akal budi".

Kondisi tersebut bisa kita saksikan melalui kasus Prita Mulyasari. Aparat pemerintah dengan berbekal penafsiran suatu UU tentang pencemaran nama baik, tanpa basa basi langsung menjebloskan yang bersangkutan ke penjara. Derita Manohara yang mengalami KDRT dari suaminya ternyata tidak mendapat tanggapan yang memadai dari KEDUBES Indonesia di Malaysia hanya karena permintaan tolong Manohara dilakukan di "hari libur". Filosofi korban sebagai tumbal diperlihatkan oleh petinggi negeri ini saat menanggapi kasus penganiayaan keji yang dialami TKI yang bekerja sebagai PRT di luar negeri. Di saat perjumpaan dengan 50 TKI yang bekerja di Arab Saudi, Presiden menyebut bahwa hanya ditemukan "tiga TKI yang bermasalah". Kenyataan bahwa dokumen perjanjian bilateral bersama empat negara penerima TKI tidak ada pasal yang mengatur tentang perlindungan kerja para TKI. Padahal dari hasil keringat TKI, negara diuntungkan dengan pemasukan remitansi sebesar 168 triliun. Jelas di sini pemerintah memperlakukan TKI sebagai komoditas dan tumbal pembangunan.

Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa perkembangan sikap, nilai-nilai, dan kebiasaan masyarakat dapat menunjukkan bagaimana sebenarnya bentuk budaya yang dianut masyarakat. Kebudayaan memiliki gerak yang paling dinamis, yaitu proses. Wilayah tersebut memungkinkan semua kerja berada dalam tahap pencarian, pertukaran, penemuan, dan pembentukan. Tahap yang masih bersifat abstrak, masih membentuk kode-kode atau simbol dasar. Dalam tahapan ini dibutuhkan suatu keterlibatan bersama. Sikap ketidakpedulian penguasa justru membuat kerja kebudayaan menjadi berjarak dan teralienasi dari realitas. Tanggapan yang realistik, langsung, dan aman menjadikan masyarakat melakukan proses pembidudayaan mereka menjadi sejuk dan nyaman.

Perlawanan terhadap hegemoni budaya dapat diwujudkan dengan mendekatkan kebudayaan ke ranah politik. Melalui politik kebudayaan, visi suatu bangsa dapat dibangun dan ditegakkan. Kesenian sebagai bagian kebudayaan dalam posisi politik kebudayaan diberi kesempatan untuk menata ulang aktivitasnya secara sosial dan politik. Daya tawar kesenian tradisional, misalnya, tidak lagi mencerminkan suatu perebutan makna secara pariwisata. Negara memberi peluang kreatif seniman untuk menemukan otoritas baru bagi penajaman karya-karyanya seperti yang terjadi pada gaya garapan pelestarian dekonstruktif. Seniman dan

karyanya, dengan meminjam istilah Gramsci, bertransformasi dari seniman tradisional menjadi seniman organik. Dari titik ini lah posisi kesenian menjadi jelas ketika terkait dengan politik kebudayaan. Pertama, nilai strategis kesenian sebagai penyebar standar simbolis dan komunikasi. Kedua, perlunya memperkuat identitas kesenian secara kolektif. Ketiga, berdampak positif bagi ekonomi dan sosial karena mengembangkan kreativitas. Keempat, memelihara kekayaan kolektif dan keragaman. Melalui politik kebudayaan, tidak ada keharusan manusia kaya secara ekonomi jika kekayaan hanya mencipta konflik persaingan dan penindasan bagi orang lain. Akan tetapi bagaimana manusia memiliki ruang leluasa beraktualisasi dan menjalankan secara aman kebiasaan mental, spiritual, dan intelektual yang disediakan oleh lembaga agama dan pendidikan.

Maka sebuah kerja kebudayaan yang sifat dasarnya adalah menyeluruh, dinamis, dan dialektis seharusnya menyertakan semua elemen kerja dari sebuah negara, termasuk para penguasa, penyelenggara negara, dan rakyatnya. Jika hal tersebut terlewatkan berarti negara merendahkan bahkan melumpuhkan kemampuan atau potensi-potensi terbaiknya. Negara dengan pemerintahannya wajib melengkapi proses tersebut dengan infrastruktur kebudayaan, yang memadai dan kondusif. Tingkat apresiasi pemerintah dengan cara peningkatan ekonomi dan perlindungan hak-hak manusiawi kepada warganya menjadi suatu keharusan.

▼ Makalah ini disampaikan di Sarasehan Budaya “Hegemoni Budaya: Represi Politik Kekuasaan Pada Dunia Seni”, yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tari Yogyakarta. Pendopo Tejokusumo, UNY, 22 Juni 2009.

¹Yasraf Amir Piliang, “Global/Lokal : Mempertimbangkan Masa Depan” dalam *Global/Lokal, Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia*, Th X-2000 (Bandung : MSPI, 2000), 111—113.

²Chris Barker, *Cultural Studies. Teori dan Praktik*. Diterjemahkan dari buku Chris Barker, *Cultural Studies. Theory and Practice*. Penerjemah Tim KUNCI Cultural Studies Center (Yogyakarta: Bentang, 2005), 53. Lihat pula Hikmat Budiman, *Lubang Hitam Kebudayaan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), 103

³Barker, 2005, 467.

⁴Idi Subandy Ibrahim, “Mencerahkan Akal Budi dalam Sangkar Hegemoni”, dalam Idi Subandy Ibrahim dan Dedy Jamaluddin Malik, ed., *Hegemoni Budaya* (Yogyakarta, Bentang: 1997), XVI.